

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Semakin berkembangnya zaman maka diikuti juga dengan meningkatnya persaingan bisnis di era globalisasi ini. Persaingan bisnis ini tidak terlepas dari pengaruh berkembangnya lingkungan ekonomi, sosial, politik, dan kemajuan teknologi. Setiap perusahaan menginginkan untuk menggambarkan kondisi perusahaan dalam keadaan yang baik bahkan tidak jarang memanipulasi laporan keuangan sehingga informasi yang terkandung dilaporan keuangan menjadi bias. Informasi yang bias tidak relevan untuk dipakai dalam pengambilan keputusan karena analisis dilakukan tidak berdasarkan informasi yang sebenarnya. Tindakan manipulasi laporan keuangan ini adalah salah satu tindakan kecurangan. Kecurangan laporan keuangan adalah kesalahan material atau penghilangan material yang dilakukan dengan cara sengaja untuk membuat informasi palsu dalam laporan keuangan yang mengecoh pembaca laporan keuangan. Kecurangan laporan keuangan bisa terjadi disebabkan karena ketika aset atau pendapatan dipublikasikannya lebih tinggi dari keadaan sesungguhnya (*overstates*) yang disajikan oleh perusahaan, dan ketika kewajiban atau beban lebih rendah dari keadaan sesungguhnya (*understates*) yang disajikan oleh perusahaan (Sudarno, 2019).

Laporan keuangan adalah informasi keuangan suatu perusahaan pada suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja suatu

perusahaan. Laporan keuangan yang baik adalah laporan keuangan yang berintegritas. *Statement of Financial Accounting Concept* (SFAC) No. 2 menjelaskan bahwa integritas informasi laporan keuangan merupakan informasi yang terkandung dalam laporan keuangan disajikan secara wajar, tidak bias dan secara jujur menyajikan informasi. Seperti yang banyak terjadi saat ini, berbagai penyimpangan laporan keuangan terjadi. Dimana suatu individu maupun entitas tertentu menyalahgunakan laporan keuangan dengan cara memanipulasi, pemalsuan, maupun yang lainnya. Banyaknya kasus manipulasi data keuangan yang sering terjadi pada suatu instansi dalam perusahaan dan lembaga usaha di Indonesia. Hal ini menunjukkan kurangnya integritas di Indonesia dalam laporan keuangan untuk menyajikan informasi pada para pengguna laporan keuangan. Timbulnya berbagai kasus kecurangan akuntansi ini lebih berkaitan dengan masalah integritas laporan keuangan, artinya informasi yang ada dalam laporan keuangan tersebut tidak disajikan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya (Rizky, 2016).

Fenomena pada tahun 2020, PT Hanson International Tbk adalah perusahaan yang ikut terlibat dan menjadi skandal dengan dua perusahaan yang sedang bermasalah yaitu PT Asabri (persero) dan PT Asuransi Jiwasraya (persero). PT Hanson International Tbk pernah terbukti terdapat manipulasi dalam laporan keuangannya untuk LKT 2016. Otoritas Jasa keuangan (OJK) kemudian memberikan sanksi kepada direktur utamanya dan pada perusahaan PT Hanson International Tbk Karena LKT tersebut terdapat rekayasa, PT Hanson International Tbk dijatuhkan sanksi oleh OJK yaitu denda sebesar lima ratus juta (Rp 500 juta) dan harus membuat penyajian kembali dengan keadaan sesungguhnya untuk

Laporan Keuangan Tahunan 2016. Kemudian Benny Tjokro yang merupakan direktur utama dikenai sanksi denda sebesar lima miliar (Rp 5 M) . Sementara karyawan lainnya yaitu Adnan Tabrani juga dijatuhi sanksi denda sebesar seratus juta. Lalu untuk auditornya dari Kantor Akuntan Publik (KAP) Purwantono, Sungkoro dan Surja, member dari *Ernst and Young Global Limited* (EY), mendapatkan hukumannya dengan dibekukannya STTD (Surat Tanda Terdaftar) untuk 1 tahun. (KOMPAS.com, 2020). Akibat dari kasus tersebut membuat hilangnya kepercayaan masyarakat dan turunya harga saham di Bursa Efek Indonesia. Fenomena manipulasi akuntansi merupakan bentuk dari kegagalan integritas dari laporan keuangan dalam menyajikan informasi yang penting untuk diketahui oleh para pengguna laporan keuangan, terutama analisis keuangan, investor dan kreditor (Wahyuni, 2021). Fenomena kasus skandal keuangan dalam laporan keuangan yang terjadi membuktikan masih kurangnya kejujuran dalam menghasilkan laporan keuangan yang berintegritas dan menyajikan informasi dalam laporan keuangan dengan kondisi yang sebenarnya. Perusahaan membuat keputusan yang tidak tepat sehingga terjadi kecurangan dalam penyusunan laporan keuangan. Manajemen perusahaan cenderung melakukan skandal karena berbagai faktor untuk menjaga perusahaan dalam kondisi baik sehingga tidak membuat pemegang saham khawatir (Inayati & Azizah, 2021)

Laporan keuangan yang memiliki integritas adalah laporan keuangan yang menampilkan kondisi suatu perusahaan yang sebenarnya, tanpa ada yang ditutupi atau disembunyikan. Integritas laporan keuangan adalah kualitas informasi yang menjamin bahwa informasi secara wajar bebas dari kesalahan dan bias serta secara jujur menyajikan apa yang dimaksudkan untuk dinyatakan. Dapat disimpulkan

bahwa integritas laporan keuangan adalah laporan keuangan yang menampilkan kondisi suatu perusahaan yang sebenarnya, tanpa ada yang ditutupi atau disembunyikan. Jadi, apabila seorang auditor mengaudit laporan keuangan yang tidak berintegritas (tidak mencerminkan kondisi perusahaan yang sebenarnya) maka, peluang seorang auditor untuk dituntut akan semakin besar. Karena apabila laporan keuangan yang tidak berintegritas itu ternyata laporan keuangan yang tidak sehat kemudian ditutupi dengan menampilkan atau melaporkan kinerja keuangan yang baik (*overstate*) akan sangat merugikan bagi pengguna laporan keuangan tersebut (Daniel, 2017).

Untuk mengukur integritas laporan keuangan digunakan rumus *Market Book Value* (MBV). *Market Book Value* bertujuan untuk menunjukkan nilai sebuah perusahaan yang diperoleh dengan membandingkan nilai pasar perusahaan (*market value*) dengan nilai bukunya (*book value*). Jika ternyata selisih antara nilai pasar dengan nilai buku perusahaan terlalu jauh (cukup signifikan), maka menandakan bahwa terdapat *hidden assets* yang tidak tercantum dalam laporan keuangan perusahaan. Hal ini berarti bahwa nilai yang dilaporkan dalam laporan keuangan sudah tidak berarti lagi. Apabila digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan maka dapat menyesatkan, karena nilai perusahaan yang tercantum pada laporan keuangan bukan nilai perusahaan yang sebenarnya. Hal tersebut juga mencerminkan rendahnya integritas laporan keuangan (Dewi, dkk. 2019).

Rendahnya integritas laporan keuangan disebabkan karena adanya perbedaan kepentingan antara manajer dengan perusahaan. Hal tersebut sesuai dengan asumsi utama dari teori keagenan bahwa tujuan pemilik (*principal*) dan tujuan manajemen (*agent*) yang berbeda dapat memunculkan konflik karena manajer perusahaan

cenderung untuk mengejar keuntungan pribadinya. Tindakan tersebut dapat dilakukan dengan mengubah angka-angka dalam laporan keuangan dengan tujuan untuk kepentingan pribadinya seperti menutup-nutupi kerugian yang terjadi pada perusahaan agar perusahaan tidak kehilangan kepercayaan para investor. Seorang agen yang lebih mengerti tentang kondisi perusahaan dituntut secara wajib untuk memberikan informasi tentang aktivitas kinerja perusahaan yang dijalankan secara lengkap kepada pihak prinsipal. Namun, terkadang informasi yang disampaikan tidak sesuai dengan fakta yang ada dalam perusahaan. Di sisi lain, prinsipal sebagai pihak yang memberi wewenang tugas kepada agen memiliki keterbatasan dalam memiliki informasi akan kinerja agen dan perusahaan secara menyeluruh. Hal itu menimbulkan asimetri informasi, dimana tidak adanya kesinambungan informasi antara pihak agen dan *principal* (Dewi, dkk. 2019).

Untuk memperoleh informasi yang lebih andal (*reliable*) agar terciptanya laporan keuangan yang bersifat konservatif dan memiliki integritas yang tinggi serta dapat berguna untuk kepentingan orang banyak maka perusahaan perlu melakukan pengawasan yang bertujuan untuk menghindari terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan seperti kecurangan yang dilakukan oleh pihak manajemen, pengawasan yang dilakukan adalah dengan menerapkan *corporate governance* yang terstruktur dan tertata dengan baik dengan konsep *Good Corporate Governance*. Kebijakan lembaga keuangan berskala besar dalam pendanaan perusahaan-perusahaan melalui pinjaman atau pemberian modal perusahaan, mulai memasukan syarat-syarat pelaksanaan *corporate governance* pada perusahaan-perusahaan yang didanainya tersebut (Dewi, dkk. 2019).

Supaya laporan keuangan menghasilkan integritas laporan keuangan yang

bermutu sesuai dengan prinsip *Good Corporate Governance*, maka *corporate governance* perusahaan harus mempunyai struktur yang tertata dengan baik untuk menjamin bahwa manajemen bertindak yang baik untuk kepentingan . Struktur *corporate governance* yang mempunyai peranan dan posisi terbaik untuk melaksanakan fungsi *monitoring* adalah peranan komisaris independen, komite audit, kepemilikan institusional, dan kepemilikan manajerial. Semakin baik penerapan *corporate governance* yang dilakukan perusahaan maka akan diharapkan mengurangi perilaku manajemen perusahaan yang bersifat oportunistik sehingga laporan keuangan dapat disajikan dengan integritas yang tinggi, yaitu laporan keuangan yang disajikan menunjukkan informasi yang benar dan jujur. (Budiarto, 2017).

Perkembangan terbaru membuktikan bahwa manajemen tidak cukup hanya memastikan bahwa proses pengelolaan manajemen berjalan dengan efisien. Namun diperlukan instrumen baru, *good corporate governance* (GCG) untuk memastikan bahwa manajemen berjalan dengan baik. *Good corporate governance* (GCG) diperlukan untuk mendorong terciptanya pasar yang efisien, transparan dan konsisten dengan peraturan perundang-undangan. GCG merupakan salah satu pilar dalam sistem ekonomi pasar. GCG berkaitan erat dengan kepercayaan baik terhadap perusahaan yang melaksanakannya maupun terhadap iklim usaha di suatu negara (Hamdani, 2016).

*Corporate governance* merupakan suatu sistem yang mengatur hubungan antara dewan komisaris, direksi, dan manajemen agar terprinsip *good corporate governance* keseimbangan dalam pengelolaan perusahaan yang telah menerapkan *corporate governance* dengan baik seharusnya sudah memenuhi prinsip GCG yaitu,

Keterbukaan informasi (*Transparency*), Akuntabilitas (*Accountability*), Pertanggungjawaban (*Responsibility*), Kemandirian (*Independen*), Kesetaraan dan Kewajaran (*fairness*), yang biasanya diakronimkan menjadi Tarif. Investor institusional juga merupakan investor yang berpengalaman sehingga dapat mengoptimalkan fungsi pengawasan dan tidak mudah diperdaya oleh tindakan manajer seperti manipulasi laporan keuangan (Atiningsih dan Yohana, 2018).

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi integritas laporan keuangan yaitu *good corporate governance*, ukuran perusahaan, dan *leverage*. Pada penelitian ini unsur *good corporate governance* diukur dengan, kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, dan komisaris independen.

Variabel independen yang pertama adalah kepemilikan institusional, kepemilikan institusional merupakan persentase kepemilikan saham perusahaan yang dimiliki oleh institusi yang berasal dari luar manajemen perusahaan. Kepemilikan institusional dianggap dapat melakukan fungsi *monitoring* yang efektif kepada manajemen perusahaan, sehingga dapat membuat manajemen lebih berfokus terhadap kinerja perusahaan sehingga dapat mempengaruhi proses penyusunan laporan keuangan (Rizkiyah, 2020).

Penelitian yang dilakukan oleh Daniel (2017), Endi (2017), Harum dan Pande (2016) menyatakan bahwa terdapat pengaruh positif antara kepemilikan institusional terhadap integritas laporan keuangan karena kepemilikan institusional akan mendorong peningkatan pengawasan yang lebih optimal terhadap kinerja manajemen. Hal ini disebabkan pemegang saham institusional memiliki sumber daya dan profesionalisme yang lebih tinggi untuk mengawasi penggunaan aktiva perusahaan dan dapat menguji keandalan dalam menganalisa informasi. Sedangkan

Hasanuddin (2018), Dade dan Endra (2017), dan Dewi (2021) menyatakan bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap integritas laporan keuangan. Hal ini disebabkan keberadaan investor institusional di perusahaan diduga belum optimal melaksanakan tindakan *monitoring* terhadap perilaku manajer di perusahaan sehingga belum mempengaruhi integritas laporan keuangan. Hasil penelitian dari Wardhani (2020) menemukan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh terhadap integritas laporan keuangan. Hal tersebut disebabkan perusahaan dapat memanfaatkan kepemilikan sahamnya oleh institusi seperti perusahaan asuransi, bank, dana pensiun, *investment* dan lain-lain dimana dapat meningkatkan penyajian laporan keuangan yang berintegritas. Perusahaan yang jumlah sahamnya dimiliki pihak eksternal semakin kecil akan meningkatkan penyajian laporan keuangan yang berintegritas tinggi. Namun penelitian Priharto (2017) menemukan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap integritas laporan keuangan. Hal ini disebabkan tingginya persentase kepemilikan saham yang dimiliki oleh pihak institusional membuat integritas laporan keuangan menjadi rendah karena disebabkan adanya ketertarikan dari pihak manajemen terhadap saham yang ditanamkan oleh pihak institusional dengan persentase yang cukup besar, sehingga pihak manajemen mempunyai hak untuk mengatur dalam penyusunan laporan keuangan dan menyebabkan pihak manajemen melakukan tindakan manipulasi terhadap laba perusahaan.

Variabel independen yang kedua adalah kepemilikan manajerial. Kepemilikan manajerial memberikan peran bagi manajemen dalam pengambilan keputusan terkait berbagai kebijakan perusahaan termasuk dalam penyajian laporan keuangan. Kepemilikan manajerial adalah persentase suara yang berkaitan dengan

kepemilikan saham dan *option* yang dimiliki oleh manajer dan direksi suatu perusahaan (Atiningsih & Suparwati, 2018). Adanya kepemilikan saham pihak manajemen perusahaan maka manajer akan meningkatkan kinerjanya serta lebih berhati-hati untuk mengambil keputusan dalam mengelola perusahaan termasuk menetapkan integritas laporan keuangan. Kepemilikan manajerial berperan dalam membatasi perilaku menyimpang dari manajemen, sehingga membuat manajemen memiliki tanggung jawab yang lebih besar untuk membuat keputusan – keputusan yang strategis untuk perusahaan (Rizkiyah, 2020).

Hasil penelitian Arista, dkk. (2018), Febriyanti & Wahidahwati (2020) menemukan kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap integritas laporan keuangan. Hal ini dikarenakan kepemilikan manajerial memiliki peran yang penting dalam penyajian laporan keuangan perusahaan berintegritas. Semakin tinggi persentase kepemilikan manajerial pada perusahaan maka semakin tinggi motivasi manajer untuk membuat keputusan yang dapat mensejahterakan pemegang saham dengan menghasilkan kinerja perusahaan yang baik yang memberikan pengaruh terhadap integritas laporan keuangan yang dihasilkan. Tingginya persentase kepemilikan manajerial yang dimiliki oleh pihak manajemen membuat Integritas laporan keuangan menjadi tinggi disebabkan karena manajemen cenderung giat dan berusaha untuk meningkatkan kerjanya dengan tujuan untuk kepentingan pemegang saham yang tidak lain dirinya sendiri, dengan adanya pihak manajemen termasuk di dalamnya anak perusahaan, membuat mereka merasa bertanggung jawab untuk mengelola perusahaan dengan baik dengan tidak memanipulasi laba. Hasil tersebut bertolak belakang dengan penelitian Fajaryani (2015) dan Wardhani (2020) yang menghasilkan bahwa kepemilikan manajerial

tidak berpengaruh terhadap integritas laporan keuangan. Hal tersebut karena kepemilikan pribadi oleh manajer biasanya tidak cukup untuk memberikan hak suara dalam pengambilan keputusan dan perusahaan yang semakin kecil proporsi kepemilikan manajerialnya, maka manajemen cenderung tidak terlalu mementingkan kepentingan pemegang saham termasuk dirinya sendiri karena akan menimbulkan integritas laporan keuangan yang kecil pula. Rendahnya kepemilikan saham manajerial akan membuat integritas laporan keuangan menjadi rendah. Sehingga manajemen bertindak mengutamakan kepentingan pribadinya. Maka menimbulkan permasalahan keagenan/konflik agensi antara kedua belah pihak. Ismail (2018) menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap integritas laporan keuangan karena besar kecilnya jumlah kepemilikan manajerial tidak mempengaruhi nilai yang konservatif untuk integritas laporan keuangan.

Variabel independen yang ketiga adalah komisaris independen, komisaris independen adalah suatu badan yang beranggotakan dewan komisaris dari luar perusahaan dan berfungsi untuk menilai kinerja manajemen secara keseluruhan. Keberadaan komisaris independen juga berfungsi untuk mengawasi dan melindungi pihak-pihak di luar manajemen serta menjadi penengah antara para manajer internal sehingga komisaris independen merupakan posisi terbaik untuk melaksanakan fungsi monitoring agar terciptanya perusahaan yang *good corporate governance* dan menghasilkan laporan keuangan yang berintegritas tinggi (Isiantoro, et al., 2017). Masuknya dewan komisaris yang berasal dari luar perusahaan (Komisaris Independen) dapat meningkatkan efektivitas dewan tersebut dalam mengawasi manajemen untuk mencegah adanya manipulasi pada laporan

keuangan. Komisaris independen merupakan solusi terbaik guna mengurangi resiko manipulasi yang dilakukan oleh manajemen terhadap keintegritasan laporan keuangan (Puteri, 2019).

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Manik dan Sofia (2019) menyatakan bahwa komisaris independen berpengaruh positif terhadap integritas laporan keuangan. Hal ini berarti semakin besar proporsi komisaris independen maka semakin tinggi nilai integritas laporan keuangan. Jika perusahaan memiliki komisaris independen maka laporan keuangan yang disajikan oleh manajemen cenderung lebih berintegritas, karena didalam perusahaan terdapat badan yang mengawasi dan melindungi hak pihak-pihak diluar manajemen perusahaan. Namun, berbeda dengan hasil penelitian dari Istiantoro, et al., (2017) menemukan bahwa Komisaris Independen memiliki pengaruh negatif terhadap Integritas Laporan Keuangan. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa peningkatan ataupun penurunan jumlah proporsi anggota komisaris independen tidak mempengaruhi tinggi rendahnya integritas laporan keuangan dan tidak mampu mengurangi konflik agensi yang timbul akibat hubungan keagenan. Jumlah komisaris independen yang besar ataupun kecil tidak mampu mensejajarkan kepentingan manajemen dan pemegang saham, sehingga tujuan perusahaan dalam mencapai nilai perusahaan dengan cara menyajikan laporan keuangan dengan integritas yang tinggi ataupun rendah tidak dapat tercapai. Pada penelitian Ismail (2018), Atiningsih dan Suparwati (2018) yang menyatakan bahwa komisaris independen tidak berpengaruh terhadap integritas laporan keuangan. Hal ini karena komisaris independen tidak terbukti berpengaruh terhadap integritas laporan keuangan dimana keberadaan komisaris independen dalam perusahaan yang diharapkan

mampu membantu kinerja manajemen dalam menyusun dan mengungkapkan laporan keuangan perusahaan tidak terbukti memiliki pengaruh terhadap integritas laporan keuangan perusahaan. Hasil penelitian Manuari & Devi (2021) menyatakan bahwa komisaris independen tidak berpengaruh terhadap integritas laporan keuangan. Hal ini dikarenakan pemegang saham mayoritas masih memiliki peran utama sehingga komisaris independen masih berpihak terhadap kepentingan pemegang saham mayoritas dan mengabaikan kepentingan pemegang saham minoritas, sehingga komisaris independen menjadi tidak independen dalam menjalankan fungsi monitoring. Pengangkatan dan keberadaan komisaris independen dalam perusahaan dilakukan hanya sebagai pemenuh regulasi dan peraturan pemerintah saja, tetapi belum dapat berfungsi untuk menegakkan tata kelola yang baik.

Variabel independen keempat yang mempengaruhi integritas laporan keuangan adalah ukuran perusahaan. Ukuran perusahaan merupakan besar kecilnya perusahaan dengan melihat penjualan dan total aset yang disajikan dalam laporan keuangan pada akhir periode (Machdar & Nurdiniah, 2018). Menurut Ariantoni (2015) Ukuran perusahaan dapat dinyatakan dalam total aktiva, penjualan dan kapitalisasi pasar. Semakin besar total aktiva, penjualan dan kapitalisasi pasar maka semakin besar ukuran perusahaan itu. Semakin besar aktiva maka semakin banyak modal yang ditanam, semakin banyak penjualan maka semakin banyak perputaran uang dan semakin besar kapitalisasi pasar maka semakin besar pula perusahaan dikenal dalam masyarakat. Ukuran perusahaan merupakan ukuran untuk menentukan besar kecilnya perusahaan klien yang di hubungan dengan keuangan perusahaan. Dimana perusahaan yang besar dipercayai dapat menyelesaikan kesulitan-kesulitan keuangan yang dihadapinya daripada perusahaan kecil. Ukuran perusahaan dapat dilihat dari total aset, penjualan, dan rata-rata penjualan. Ketiga

pengukuran tersebut sering digunakan untuk mengidentifikasi besar kecilnya suatu perusahaan karena semakin besar aset yang dimiliki oleh perusahaan, maka semakin besar modal yang ditanam. Semakin besar penjualan, maka semakin besar pula perputaran uang dalam perusahaan tersebut dan semakin besar kapitalisasi pasar maka perusahaan tersebut semakin terkenal oleh masyarakat (Rifai et al., 2015). Menurut Verya, dkk. (2017), perusahaan yang berukuran besar cenderung lebih banyak mengungkapkan butir-butir dalam laporan keuangannya karena memiliki lebih banyak informasi untuk diungkapkan. Perusahaan berukuran besar juga dinilai mempunyai karyawan yang lebih ahli dalam memahami integritas laporan keuangan.

Penelitian Fajaryani (2015) didukung oleh penelitian dari Verya, (2017) menemukan hasil bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap integritas laporan keuangan, hal tersebut berarti semakin besar ukuran perusahaan maka akan semakin tinggi pula integritas informasi pada laporan keuangan. Pada penelitian Karo-Karo (2017) yang menunjukkan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap integritas laporan keuangan. Dalam hal tersebut maka seharusnya perusahaan yang memiliki aset yang cukup besar diperlukan pengawasan yang ketat dalam mengawasi pengelolaan aset perusahaan, agar manajer tidak dapat memanipulasi laporan keuangan perusahaan. Pada penelitian Ismail (2018) menemukan hasil bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap integritas laporan keuangan. Penelitian ini membuktikan bahwa besar kecilnya sebuah perusahaan tidak akan berpengaruh terhadap integritas laporan keuangan. Berbeda dengan penelitian Paulina (2018) yang menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap integritas laporan keuangan hal ini dikarenakan

perusahaan besar sangat menyadari bahwa mereka menjadi sorotan publik. Dengan semakin besar ukuran perusahaan maka akses informasi yang tersedia untuk publik akan semakin banyak, sehingga campur tangan dalam penyusunan pelaporan keuangan eksternal dapat bertujuan menguntungkan diri sendiri dan akan menurunkan integritas laporan keuangan.

Variabel independen yang kelima adalah *leverage*, *leverage* merupakan jumlah utang yang digunakan untuk membiayai atau membeli aset-aset perusahaan. Perusahaan yang memiliki utang lebih besar dari modal dikatakan sebagai perusahaan dengan tingkat *leverage* yang tinggi (Fakhrudin, 2015). Keberadaan tingkat utang dalam struktur pendanaan perusahaan akan meningkatkan pengawasan tidak hanya oleh investor namun juga kreditor (Fajaryani, 2015). Semakin tinggi *leverage* maka menggambarkan semakin besarnya kewajiban perusahaan terhadap para kreditor. Susilowati, et al., (2017) menyatakan bahwa Perusahaan yang memiliki *leverage* tinggi lebih dituntut untuk memberikan informasi yang lebih besar dibandingkan dengan perusahaan yang memiliki *leverage* lebih rendah. Hal ini penting dilakukan untuk membangun kepercayaan yang lebih kuat dari kreditor.

Schiper dalam Fajaryani (2015) mengungkapkan untuk menghilangkan keraguan kreditor akan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajibannya, perusahaan perlu mengungkapkan informasi dengan integritas yang tinggi. Oleh karena itu, perusahaan dengan *leverage* yang tinggi memiliki kewajiban untuk mengungkapkan informasi secara lebih luas dibandingkan perusahaan dengan *leverage* yang rendah. Akan tetapi, semakin tinggi *leverage* perusahaan akan meningkatkan risiko yang dihadapi investor sehingga mereka menuntut perusahaan

untuk memperoleh keuntungan yang besar. Kondisi ini memicu manajer untuk melakukan manajemen laba yang berdampak pada integritas laporan keuangan. Watts dan Zimmerman (1990: 139) dalam Fajaryani (2015) menyatakan dalam hipotesis utang (*debt covenant hypothesis*) bahwa semakin tinggi hutang suatu perusahaan atau semakin dekat perusahaan ke arah pelanggaran persyaratan utang yang didasarkan atas angka akuntansi maka manajer akan terdorong untuk menyajikan laporan keuangan dengan integritas yang rendah melalui pemilihan prosedur-prosedur akuntansi yang memindahkan laba periode mendatang ke periode berjalan.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Mais dan Nuari (2016) menunjukkan bahwa *leverage* berpengaruh negatif terhadap integritas laporan keuangan. Hal tersebut terjadi karena *leverage* akan meningkatkan risiko yang dihadapi oleh investor sehingga memicu mereka untuk menuntut return yang lebih besar. Akibatnya, manajer akan melakukan manajemen laba yang dapat menurunkan integritas laporan keuangan (Fajaryani, 2015). Hasil penelitian dari Karo-Karo (2017), Menemukan bahwa *leverage* berpengaruh terhadap integritas laporan keuangan. Hal tersebut menunjukkan bahwa perusahaan yang mempunyai tingkat *leverage* yang tinggi menunjukkan bahwa perusahaan secara efisien menggunakan pembiayaan dari eksternal untuk meningkatkan kekayaan pemegang saham yang kedua kreditor meyakini rencana bisnis dan prospek perusahaan di masa mendatang dengan memberikan pinjaman dengan jumlah yang relatif besar. Hasil penelitian dari Wardhani (2020) menyatakan bahwa *leverage* tidak berpengaruh terhadap integritas laporan keuangan. *Leverage* yang tinggi pada perusahaan menunjukkan tingkat hutang yang tinggi daripada modal sendiri (*equity*). Tingginya tingkat

hutang dalam suatu perusahaan akan menimbulkan persepsi investor yang akan menanamkan modalnya. Sehingga akan memicu manajemen perusahaan melakukan strategi untuk membuat nilai portofolio efek menjadi lebih baik (*window dressing*) terhadap laporan keuangan. Para investor akan menimbang-nimbang jika perusahaan memiliki hutang yang tinggi, karena akan berdampak pada kerugian yang akan terjadi di masa mendatang. Penelitian dari Tiara (2018) menemukan hasil jika *leverage* memiliki pengaruh positif terhadap integritas laporan keuangan. Hal tersebut menunjukkan besar *leverage* pada suatu perusahaan dapat meningkatkan integritas laporan keuangan jika *leverage* di perusahaan tersebut sesuai dengan ukuran perusahaan dan digunakan dengan sebaik baiknya oleh perusahaan, karena setiap perusahaan akan berkembang dan lebih baik jika perusahaan mempunyai hutang untuk pemutar modal awal suatu perusahaan.

Penelitian terkait integritas laporan keuangan sebelumnya masih menunjukkan hasil yang berbeda-beda (*research gap*) sehingga menimbulkan ketidakjelasan dari hasil penelitian. Oleh karena itu, masih sangat memungkinkan kembali untuk meneliti mengenai integritas laporan keuangan agar diperoleh kejelasan hasil penelitian *good corporate governance*, ukuran perusahaan dan *leverage* yang dapat mempengaruhi integritas laporan keuangan. Karena pelaporan informasi akuntansi yang memiliki integritas memungkinkan penggunaanya untuk bergantung pada informasi tersebut dalam pengambilan keputusan, sehingga tidak menyesatkan pengguna laporan keuangan dalam membuat keputusan. Melalui penelitian kembali ini diharapkan dapat memberikan jawaban mengenai penyebab adanya hasil yang tidak konsisten antara penelitian sebelumnya, selain itu dapat menjadi

pertimbangan bagi investor serta pihak internal perusahaan dalam memprediksi kondisi keuangan perusahaan.

Berdasarkan ketidakkonsistenan dari hasil-hasil penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya, maka peneliti tertarik untuk menguji kembali dengan variabel yang lebih relevan yang disarankan oleh peneliti sebelumnya dengan menggunakan data terbaru untuk menghasilkan riset terbaru, disamping itu melihat pentingnya integritas laporan keuangan bagi pihak internal dan eksternal perusahaan dalam pengambilan keputusan maka akan dilakukan sebuah penelitian mengenai faktor-faktor yang diduga berpengaruh pada integritas laporan keuangan yaitu dengan judul **“Pengaruh *Good Corporate Governance*, Ukuran Perusahaan Dan *Leverage* Pada Perusahaan *Property* dan *Real estate* 2018-2021”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang permasalahan dan kondisi yang telah dibahas diatas, muncul ketertarikan untuk melakukan pengujian kembali mengenai *Good Corporate Governance*, Ukuran Perusahaan, dan *Leverage*, Pada Perusahaan *Property* dan *Real estate* yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2018-2021. Maka perumusan masalah akan dikemukakan sebagai berikut :

- 1.) Apakah kepemilikan institusional berpengaruh terhadap integritas laporan keuangan ?
- 2.) Apakah kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap integritas laporan keuangan ?

- 3.) Apakah komisaris independen berpengaruh terhadap integritas laporan keuangan ?
- 4.) Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap integritas laporan keuangan ?
- 5.) Apakah *leverage* berpengaruh terhadap integritas laporan keuangan ?

### 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang permasalahan dan kondisi yang telah dibahas diatas, adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini, sebagai berikut:

- 1.) Untuk menganalisis pengaruh kepemilikan institusional terhadap integritas laporan keuangan.
- 2.) Untuk menganalisis pengaruh kepemilikan manajerial terhadap integritas laporan keuangan.
- 3.) Untuk menganalisis pengaruh komisaris independen terhadap integritas laporan keuangan.
- 4.) Untuk menganalisis pengaruh ukuran perusahaan terhadap integritas laporan keuangan.
- 5.) Untuk menganalisis pengaruh *leverage* terhadap integritas laporan keuangan.

### 1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1.) Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi dan memberikan kontribusi pada pengembangan teori akuntansi terutama yang berkaitan dengan konsep konservatisme terkait dengan integritas laporan keuangan. Dan bermanfaat bagi peneliti sejenis maupun civitas akademika lainnya dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan untuk perkembangan dan kemajuan pendidikan khususnya yang berkaitan dengan *Good Corporate Governance*, ukuran perusahaan, *leverage* dan dampaknya terhadap integritas laporan keuangan.

## 2.) Manfaat Praktis

Penelitian ini disajikan untuk menambah wawasan dan pengetahuan bagi peneliti tentang integritas laporan keuangan dan faktor-faktor yang mempengaruhinya serta dampaknya terhadap perusahaan *property* dan *real estate* di Bursa Efek Indonesia. Bagi investor dan calon investor, hasil penelitian ini diharapkan mampu menambah informasi dan menjadi bahan pertimbangan untuk pengambilan keputusan. Selain itu penelitian ini juga digunakan untuk mengaplikasikan ilmu pengetahuan yang diperoleh pada saat perkuliahan dan membandingkan dengan kenyataan yang ada dilapangan.

## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1 Landasan Teori

#### 2.1.1 Teori Agensi (Agency Theory)

Jensen dan Meckling (1976) mendefinisikan teori keagenan didasarkan pada konflik antara agen dan *principal*. Di mana agen adalah pihak yang dipercayakan oleh *principal* untuk mengoperasikan perusahaan sedangkan *principal* adalah pihak yang dipercayakan oleh agen untuk bertindak atas nama *principal*, Terdapat dua macam bentuk hubungan keagenan, yaitu antara manajer dan pemegang saham (*shareholders*) dan antara manajer dan pemberi pinjaman (*bondholders*) (Dewi dan Putra, 2016).

Dengan adanya perkembangan perusahaan yang semakin besar maka sering terjadi konflik antara *principal* dalam hal ini adalah para pemegang saham (investor) dan pihak *agent* yang diwakili oleh manajemen (direksi). Munculnya masalah *agency problem* disebabkan oleh adanya ketidakseimbangan penguasaan informasi yang akan memicu munculnya kondisi yang disebut sebagai asimetri informasi (*information asymmetry*). Baik pemilik maupun agen diasumsikan mempunyai rasionalisasi ekonomi dan semata-mata mementingkan kepentingannya sendiri. Penerapan *corporate governance* juga dapat memberikan kepercayaan terhadap kinerja manajemen dalam mengelola kekayaan pemilik (pemegang saham), sehingga dapat meminimalkan konflik kepentingan dan biaya keagenan (*agency cost*) (Karo-Karo, 2017).

Kedua pihak tersebut, baik *shareholder* sebagai *principal* maupun manajer sebagai *agent*, memiliki kontribusi yang sama pentingnya dalam berjalannya suatu perusahaan. *Shareholder* berkontribusi dalam hal pendanaan perusahaan, sedangkan manajer berkontribusi dalam hal waktu, tenaga, pemikiran, *skills*, *networking*, maupun keahlian-keahlian lainnya yang diperlukan dalam menjalankan bisnis dari perusahaan tersebut. Di sisi lain, masing-masing pihak juga memiliki kepentingan yang bertolak belakang, sehingga seringkali menjadi potensi konflik.

Tujuan utama *shareholder* menanamkan modalnya dalam pendirian suatu perusahaan adalah untuk memperoleh kemakmuran finansial yang maksimal melalui pencapaian laba (*profit*) sebesar-besarnya dari aktivitas bisnis yang dijalankan oleh perusahaan. Konsep ini disebut dengan *shareholder wealth maximization*. Sedangkan manajer bersedia meluangkan waktu, tenaga, pemikiran, dan kontribusi lainnya untuk perusahaan dengan maksud untuk mencapai kenyamanan dan kemakmuran bagi kehidupan pribadinya. Tentu saja tujuan manajer ini bertentangan dengan *shareholder wealth maximization*, sehingga timbul masalah keagenan atau *agency problem* (Karo-Karo, 2017).

Salah satu bentuk *agency problem* yang sering terjadi yaitu berupa tuntutan manajer akan bonus yang tinggi. Pemberian bonus yang tinggi tentu akan memberikan kenyamanan bagi kehidupan pribadi manajer, namun nilai bonus yang tinggi tersebut di sisi lain akan mengurangi nilai keuntungan yang dapat dinikmati oleh *shareholder*. Selain itu, *agency problem* juga sering terjadi pada kebijakan struktur modal di perusahaan. *Shareholder* cenderung ingin segera menikmati keuntungan perusahaan dalam bentuk dividen, sedangkan untuk ekspansi usaha,

manager biasanya lebih mengutamakan nilai laba ditahan (*retained earning*) sebagai sumber pendanaannya daripada hutang. Nilai *retained earning* yang besar tentu saja akan mengurangi nilai dividen. Perbedaan kepentingan antara *shareholder* dan manajer ini seringkali menjadi penyebab terjadinya kecurangan atau *fraud* karena hanya mengutamakan kepentingan pihak tertentu saja. Kasus Enron dan WorldCom yang terjadi pada tahun 2002 di Amerika Serikat merupakan contoh nyata dari *agency problem* yang berujung pada *fraud* yang pada akhirnya membawa kehancuran bagi perusahaan dan kerugian yang besar bagi banyak pihak.

Berdasarkan asumsi dasar sifat manusia, manajer sebagai manusia akan bertindak oposisi, yaitu mengutamakan kepentingan pribadinya. Manajer berkewajiban untuk menyajikan pengungkapan informasi akuntansi kepada *principal* melalui laporan keuangan. Laporan keuangan tersebut berguna bagi para pengguna internal maupun eksternal terutama karena kelompok ini berada dalam kondisi yang paling besar ketidakpastian informasinya.

Memberikan pengembalian yang sebesar-besarnya atas investasi yang salah satunya ditunjukkan dengan kenaikan laba dan dividen dari setiap saham yang dimiliki. Laporan keuangan yang disampaikan secara tepat waktu dan andal akan mengurangi asimetri informasi. Hal tersebut menjadikan manajemen diharapkan mengambil kebijakan yang menguntungkan pemilik perusahaan dalam hubungan keagenan. Munculnya masalah agensi yang disebabkan konflik perbedaan kepentingan dan asimetri informasi tersebut dapat membuat perusahaan menanggung biaya keagenan. Menurut Jensen dan Meckling (1976) adanya masalah keagenan memunculkan biaya agensi yang terdiri dari:

1. *The monitoring expenditure by the principle (monitoring cost)*, yaitu biaya

pengawasan yang dikeluarkan oleh *principal* untuk mengawasi perilaku dari *agent* dalam mengelola perusahaan.

2. *The bounding expenditure by the agent (bounding cost)*, yaitu biaya yang dikeluarkan oleh *agent* untuk menjamin bahwa *agent* tidak bertindak yang merugikan *principal*.
3. *The Residual Loss*, yaitu penurunan tingkat utilitas *principal* maupun *agent* karena adanya hubungan agensi. Konflik kepentingan terjadi tidak hanya antara investor dan manajer, tetapi juga antara pemegang saham mayoritas dan pemegang saham minoritas. *Controlling shareholders* biasanya mengendalikan keputusan manajemen dan cenderung mengabaikan kepentingan *minority shareholders*.

Teori agensi menyatakan bahwa konflik kepentingan dan informasi yang muncul dapat dikurangi dengan mekanisme pengawasan yang tepat untuk menyelaraskan kepentingan berbagai pihak di perusahaan. Mekanisme pengawasan yang dimaksud dalam teori agensi dapat dilakukan dengan menggunakan mekanisme *corporate governance* (Ariastini, 2017). *Corporate governance* diharapkan bisa berfungsi sebagai alat untuk memberikan keyakinan kepada para investor bahwa mereka akan menerima return atas dana yang telah mereka investasikan. Penerapan *corporate governance* juga dapat memberikan kepercayaan terhadap kinerja manajemen dalam mengelola kekayaan pemilik (pemegang saham), sehingga dapat meminimalkan konflik kepentingan dan biaya keagenan (*agency cost*). *Good corporate governance* menghasilkan berbagai mekanisme yang bertujuan untuk meyakinkan bahwa tindakan manajemen sudah selaras dengan kepentingan pemegang saham (Jensen dan Meckling, 1976).

### 2.1.2 Pengertian Integritas Laporan Keuangan

Integritas secara terminologi berarti mutu, sifat, atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan, kejujuran. Laporan keuangan yang berkualitas adalah laporan keuangan yang memiliki integritas dalam penyajiannya. Latifah, (2015:3) menyatakan “Integritas laporan keuangan adalah sejauh mana informasi yang terdapat dalam laporan keuangan disajikan secara jujur dan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi berlaku umum”. Dengan kata lain, Laporan keuangan yang berintegritas tinggi lebih dipercaya oleh pemakai laporan keuangan dalam pengambilan keputusan karena laporan keuangan yang disajikan menunjukkan informasi yang benar dan jujur tanpa ada unsur kecurangan di dalamnya.

Integritas pada laporan keuangan tercermin pada data yang sesuai kondisi perusahaan dan akurat tanpa ada yang ditutupi serta berpegang teguh pada karakteristik utamanya yaitu keandalan, relevan dan disajikan berdasarkan standar akuntansi yang berlaku umum, tujuannya penyajian laporan keuangan yang memiliki integritas tinggi karena dengan adanya integritas pada laporan keuangan berpotensi untuk menjaga kepercayaan publik dan nilai perusahaan. Pengukuran integritas laporan keuangan menggunakan indeks konservatisme ini dikarenakan apabila perusahaan menggunakan prinsip konservatif maka penyajian laporan keuangan dinilai lebih *reliable* karena perusahaan mencatat nilai perusahaan tidak *overstate* sehingga tidak ada pihak yang dirugikan atas penyajian laporan keuangan tersebut, maka dari itu dengan diterapkannya prinsip konservatif dalam laporan keuangan menjadi salah satu faktor untuk meningkatkan integritas laporan keuangan (Arista, et al., 2019).

Berdasarkan berbagai pengertian integritas laporan keuangan tersebut dapat disimpulkan bahwa integritas laporan keuangan merupakan penyajian laporan keuangan secara jujur tidak bias dan sesuai dengan informasi yang disajikan dengan menggambarkan realitas ekonomi perusahaan sesungguhnya (Dewi, 2016) dan (Ayem, 2019).

### **2.1.3 Good Corporate Governance Perusahaan**

Menurut *Cadbury Committee of United Kingdom*, *good corporate governance* adalah sistem yang mengatur hubungan antara pengurus perusahaan, pemegang saham, pihak kreditur, pemerintah, karyawan, dan pemegang kepentingan internal maupun eksternal yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka. Selain itu, definisi lain menyebutkan bahwa *good corporate governance* adalah suatu sistem pengendalian internal perusahaan yang memiliki tujuan utama mengelola risiko yang signifikan guna memenuhi tujuan bisnisnya melalui pengamanan aset perusahaan dan meningkatkan nilai investasi pemegang saham dalam jangka panjang (Sudarmanto, 2021:73). Ulfa, et al., (2021) menyatakan bahwa tata kelola sebagai upaya menjaga hubungan antara tiga aktor penting (yaitu pemilik, manajemen, dan dewan direksi atau direksi) di masing-masing perusahaan. Untuk menekankan pada hubungan mereka dan interaksi dalam praktik tata kelola perusahaan, pendekatan yang digunakan didasarkan pada struktur pemerintahan sebagai elemen utama dalam setiap sistem tata kelola perusahaan. Hubungan antara ketiga unsur tersebut sistem tata kelola perusahaan akan menentukan arah serta kinerja korporasi sesuai dengan mekanisme yang telah ditetapkan.

GCG adalah sebuah proses dan struktur yang diterapkan dalam menjalankan

perusahaan, dengan tujuan meningkatkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan memperhatikan seluruh pemangku kepentingan. GCG juga sebagai pengaturan dan hubungan institusional yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan. Penerapan GCG diharapkan dapat menunjang stabilitas ekonomi yang berkesinambungan, sehingga tercipta iklim usaha yang kondusif (Hamdani, 2016)

*Good Corporate Governance* merupakan suatu cara untuk menjamin bahwa manajemen bertindak yang terbaik untuk kepentingan *stakeholder*. Pelaksanaan *Good Corporate Governance* menuntut adanya perlindungan yang kuat terhadap hak-hak pemegang saham minoritas. Prinsip-prinsip atau pedoman pelaksanaan *Corporate Governance* menunjukkan adanya perlindungan tersebut. *Good Corporate Governance* secara definitif merupakan sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan untuk menciptakan nilai tambah (*value added*) untuk semua *stakeholders*. Pihak-pihak tersebut adalah pihak internal yang meliputi dewan komisaris, direksi, karyawan, dan pihak eksternal yang berkepentingan. Pemahaman atas tata kelola perusahaan yang baik adalah untuk menciptakan kredibilitas manajemen baik pada perusahaan bisnis manufaktur maupun perusahaan jasa serta lembaga pelayanan publik pemerintahan serta dengan tujuan untuk meningkatkan produktivitas usaha. Mekanisme *Good corporate governance* merupakan suatu aturan main, prosedur dan hubungan yang jelas antara pihak yang mengambil keputusan dengan pihak yang melakukan kontrol atau pengawasan terhadap keputusan tersebut. Mekanisme *governance* diarahkan untuk menjamin dan mengawasi berjalannya sistem *governance* dalam sebuah organisasi (Verya, 2017).

Adapun prinsip-prinsip *good corporate governance* berdasarkan Peraturan

Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-01/MBU/2011 adalah:

1. Transparansi (*transparency*), yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengungkapkan informasi material dan relevan mengenai perusahaan
2. Akuntabilitas (*accountability*), yaitu kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban Organ sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif
3. Pertanggungjawaban (*responsibility*), yaitu kesesuaian di dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat
4. Kemandirian (*independency*), yaitu keadaan di mana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat
5. Kewajaran (*fairness*), yaitu keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak-hak Pemangku Kepentingan (*stakeholders*) yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan.

Adapun tujuan penerapan *good corporate governance* suatu perusahaan adalah sebagai berikut (Fatimah, dkk., 2019):

1. Mengembangkan dan meningkatkan nilai perusahaan.
2. Mengelola sumber daya dan risiko secara lebih efektif dan efisien.
3. Meningkatkan disiplin dan tanggung-jawab dari organ perusahaan demi menjaga kepentingan para *Shareholder* dan *Stakeholder* perusahaan.
4. Meningkatkan kontribusi perusahaan (khususnya perusahaan perusahaan)

pemerintah) terhadap perekonomian nasional.

5. Meningkatkan investasi nasional.

6. Menyukseskan program privatisasi perusahaan-perusahaan pemerintah.

Berdasarkan pendapat tersebut, tujuan dalam menerapkan *good corporate governance* adalah untuk melindungi kepentingan pemegang saham dan pihak-pihak yang terkait dalam pengelolaan perusahaan agar perusahaan dapat melaksanakan kegiatannya dengan efektif dan efisien sehingga dapat meningkatkan nilai saham dan kepercayaan publik terhadap perusahaan.

### **2.1.3.1 Kepemilikan Institusional**

Kepemilikan institusional merupakan persentase saham perusahaan yang dimiliki oleh perusahaan lain baik yang berada di dalam maupun luar negeri serta saham yang dimiliki pemerintah dalam maupun luar negeri. Institusional merupakan investor dengan kepemilikan saham yang besar sehingga mereka memiliki peluang, sumber daya, dan kemampuan untuk mengawasi dan mempengaruhi manajemen Tingkat pengawasan yang ketat dari institusional sebagai pemilik saham perusahaan mampu mengurangi insentif para manajer yang bertindak dengan mengutamakan kepentingan diri sendiri. Selain itu, investor institusional merupakan investor yang berpengalaman. Sehingga dapat melakukan fungsi pengawasan secara lebih efektif dan tidak mudah diperdaya oleh tindakan manajer seperti manipulasi penyajian laporan keuangan yang dapat melemahkan integritas laporan keuangan tersebut (Daniel, 2017). Jensen dan Meckling (1976) menyatakan bahwa kepemilikan institusional memiliki peranan yang sangat penting dalam meminimalisasi konflik keagenan yang terjadi antara manajer dan pemegang saham.

Kepemilikan institusional diartikan sebagai besarnya saham milik institusi maupun lembaga seperti bank, perusahaan investasi, perusahaan asuransi dan kepemilikan institusi lain yang berada diluar ataupun dalam dibanding jumlah saham beredar (Siahan, 2017). Pemegang saham institusi berkompetensi untuk melakukan pengawasan terhadap manajemen dan melindungi hak pemegang saham minoritas, sehingga keputusannya dipertimbangkan. Kepemilikan institusi mencerminkan hak institusi yang mana kontrol perusahaan menjadi semakin tinggi jika persentase saham milik lembaga maupun institusi semakin tinggi. Penggunaan utang perusahaan juga menurun akibat adanya kepemilikan institusional karena fungsi utang sebagai mekanisme *monitoring* telah diambil alih oleh pemegang saham institusi. *Monitoring* tersebut tentunya akan kemakmuran untuk pemegang saham, pengaruh kepemilikan institusional sebagai agen pengawas ditekan melalui investasi mereka yang cukup besar dalam pasar modal. Semakin besar kepemilikan oleh institusi keuangan maka semakin besar pula kekuatan suatu nilai perusahaan. Kepemilikan institusional memiliki kelebihan yaitu memiliki profesionalisme dalam menganalisis informasi sehingga dapat menguji keandalan informasi serta memiliki motivasi yang kuat untuk melaksanakan pengawasan lebih ketat atas aktivitas yang terjadi di dalam perusahaan (Akram, et al., 2017).

### **2.1.3.2 Kepemilikan Manajerial**

Kepemilikan manajerial adalah situasi dimana manajer memiliki saham perusahaan atau dengan kata lain manajer tersebut sekaligus sebagai pemegang saham perusahaan. Dalam laporan keuangan, keadaan ini ditunjukkan dengan besarnya persentase kepemilikan saham perusahaan oleh manajer. Karena hal ini merupakan informasi penting bagi pengguna laporan keuangan maka informasi ini

akan diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Adanya kepemilikan manajerial menjadi hal yang menarik jika dikaitkan dengan *agency theory*. Kepemilikan manajerial merupakan kondisi di mana manajer memiliki saham perusahaan atau dengan kata lain manajer tersebut juga sekaligus sebagai pemegang saham perusahaan (Tarigan, 2016).

Oktaviana & Paramitha, (2021) menyatakan bahwa dalam keuangan perusahaan, kepemilikan manajerial didefinisikan sebagai proporsi saham perusahaan yang dipegang oleh eksekutif puncak perusahaan. Kepemilikan manajerial dapat dilihat dari dua perspektif, yaitu pendekatan keagenan dan pendekatan ketidakseimbangan, yang keduanya valid. Pendekatan keagenan memandang kepemilikan manajemen sebagai instrumen atau teknik yang akan digunakan untuk meminimalkan konflik keagenan antara banyak klaim terhadap korporasi. Pendekatan ketidakseimbangan melihat mekanisme struktur kepemilikan manajemen sebagai sarana untuk mengurangi ketidakseimbangan informasi antara orang dalam dan orang luar dengan meningkatkan keterbukaan informasi di dalam bisnis, sesuai dengan pendekatan tersebut. Menurut Pasaribu (2016:156) kepemilikan manajerial adalah pemilik/pemegang saham oleh pihak manajemen perusahaan yang secara aktif berperan dalam pengambilan keputusan perusahaan. *Agent* diberi mandat oleh *principal* untuk menjalankan bisnis demi kepentingan *principal*. Manajer sebagai *agent* dan pemegang saham sebagai *principal*. Keputusan bisnis yang diambil manajer adalah keputusan untuk memaksimalkan sumber daya (utilitas) perusahaan. Suatu ancaman bagi pemegang saham jikalau manajer bertindak untuk kepentingannya sendiri, bukan untuk kepentingan pemegang saham. Dalam konteks ini masing-masing pihak memiliki

kepentingan sendiri-sendiri. Inilah yang menjadi masalah dasar dalam *agency theory* yaitu adanya konflik kepentingan. Pemegang saham dan manajer masing-masing berkepentingan untuk memaksimalkan tujuannya. Masing-masing pihak memiliki risiko terkait dengan fungsinya, manajer memiliki resiko untuk tidak ditunjuk lagi sebagai manajer jika gagal menjalankan fungsinya, sementara pemegang saham memiliki resiko kehilangan modalnya jika salah memilih manajer. Kondisi tersebut akan berbeda jika manajer memiliki rangkap jabatan yaitu sebagai manajer dan juga sekaligus sebagai pemegang saham. Secara teoritis ketika kepemilikan manajerial rendah maka insentif terhadap kemungkinan terjadinya perilaku oportunistik manajer akan meningkat. Adanya kepemilikan manajerial dipandang dapat menyelaraskan adanya potensi perbedaan kepentingan antara pemegang saham luar dengan manajemen (Jensen, 2016:339).

Kepemilikan manajerial didefinisikan sebagai tingkat kepemilikan saham pihak manajemen yang secara aktif ikut dalam pengambilan keputusan, misalnya seperti direktur, manajemen, dan komisaris. Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa kepemilikan manajerial merupakan pemilik saham perusahaan yang berasal dari manajemen yang ikut serta dalam pengambilan keputusan suatu perusahaan yang bersangkutan. Dengan demikian kepemilikan pemegang saham oleh manajer, diharapkan akan bertindak sesuai dengan keinginan para *principal* karena manajer akan termotivasi untuk meningkatkan kinerja. Besar kecilnya jumlah kepemilikan saham manajerial dalam perusahaan mengindikasikan adanya kesamaan kepentingan antara manajer dengan pemegang saham.

### **2.1.3.3 Komisaris Independen**

Komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang berasal dari luar

perusahaan. Adanya komisaris independen pada teori keagenan yaitu dapat meningkatkan transparansi terhadap kinerja manajemen, sehingga dapat meminimalkan adanya tindakan manajemen dari segala bentuk penyimpangan yang mungkin terjadi (Ismail, 2018). Sehubungan dengan teori agensi, pemegang saham sering dirugikan karena pemberitahuan yang tidak merata dari informasi internal perusahaan. Oleh karena itu, hadirnya peran komisaris independen dalam perusahaan akan memudahkan investor untuk mendapatkan informasi internal mengenai tindakan dan keputusan yang diambil oleh manajemen (Pariduri, et. al., 2018). Selain itu, dengan adanya komisaris independen diharapkan laporan keuangan yang disajikan oleh manajemen berintegritas tinggi dan dapat dipertanggungjawabkan agar tidak menyesatkan pengguna laporan keuangan.

Sedangkan menurut Istiantoro dkk. (2017). Komisaris independen bertujuan untuk menyeimbangkan dalam pengambilan keputusan khususnya dalam rangka perlindungan terhadap pemegang saham minoritas dan pihak-pihak lain yang terkait. Keberadaan komisaris independen yang ada di dalam perusahaan memiliki fungsi untuk mengawasi dan melindungi pihak-pihak diluar manajemen perusahaan, menjadi penengah dalam perselisihan yang terjadi diantara para manajer internal dan mengawasi kebijakan manajemen serta memberikan nasihat kepada manajemen sehingga komisaris independen merupakan posisi terbaik untuk melaksanakan fungsi *monitoring* agar terciptanya perusahaan yang *good corporate governance* dan menghasilkan laporan keuangan yang berintegritas tinggi. Keberadaan komisaris independen telah diatur Bursa Efek Jakarta melalui peraturan BEI tanggal 1 Juli 2000. Dikemukakan bahwa perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia harus mempunyai komisaris independen yang secara proporsional

sama dengan jumlah saham yang dimiliki pemegang saham yang minoritas (bukan *controlling shareholders*). Dalam peraturan ini persyaratan jumlah minimal komisaris independen adalah 30% dari seluruh anggota dewan komisaris.

#### **2.1.4 Ukuran Perusahaan**

Ukuran perusahaan adalah besar kecilnya suatu perusahaan berdasarkan nilai ekuitas, penjualan, atau asetnya. Saad dan Faraschahaya (2019) juga mengemukakan bahwa ukuran perusahaan dapat diukur dengan mentransformasikan seluruh aset yang dimiliki oleh perusahaan tersebut ke dalam bentuk logaritma natural. Perusahaan yang berskala besar akan dihadapkan pada tuntutan yang lebih besar dari *Stakeholder* dalam penyajian laporan keuangan sesuai dengan keadaan sebenarnya dibandingkan dengan perusahaan kecil (Gusliana dan Nuari, 2016).

Ukuran perusahaan adalah suatu skala dimana dapat diklasifikasikan besar kecilnya perusahaan menurut berbagai cara, antara lain total aktiva, *log size* nilai pasar saham, jumlah karyawan, dan lain-lain. Pada dasarnya ukuran perusahaan hanya terbagi dalam tiga kategori, yaitu perusahaan besar (*large firm*), perusahaan menengah (*medium firm*), dan perusahaan kecil (*small firm*). Perusahaan besar yang sahamnya tersebar sangat luas, maka setiap perluasan modal saham hanya akan mempunyai pengaruh yang kecil terhadap kemungkinan hilangnya atau tergesernya pengendalian dari pihak yang dominan terhadap perusahaan bersangkutan. Sebaliknya, perusahaan yang kecil, dimana sahamnya tersebar hanya di lingkungan kecil, penambahan jumlah saham akan mempunyai pengaruh yang besar terhadap kemungkinan hilangnya kontrol pihak dominan terhadap perusahaan yang bersangkutan. Sehingga ketika ukuran perusahaan bertambah besar, kepentingan

publik atas penyajian laporan keuangan yang terintegrasi juga semakin tinggi. Perusahaan dengan ukuran besar diasumsikan dengan jumlah aktiva dan tingkat pendapatan yang besar sehingga menghasilkan laba yang tinggi. Sebaliknya jika penjualan lebih kecil daripada biaya variabel dan biaya tetap maka perusahaan akan menderita kerugian. Perusahaan berskala kecil dibandingkan dengan perusahaan yang berskala besar cenderung kurang menguntungkan. Perusahaan dapat diukur dengan menggunakan tiga alternative indikator, antara lain nilai total *asset* yang diperoleh dari neraca, kemudian besarnya total penjualan bersih yang dapat dari laporan laba rugi dan yang terakhir adalah nilai kapitalisasi pasar yang diperoleh dengan cara mengalikan jumlah saham yang beredar dengan harga saham (Gusliana dan Nuari, 2016).

Berdasarkan uraian tentang ukuran perusahaan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa ukuran perusahaan merupakan suatu indikator yang dapat menunjukkan suatu kondisi atau karakteristik suatu organisasi atau perusahaan dimana terdapat beberapa parameter yang dapat digunakan untuk menentukan ukuran (besar/kecilnya) suatu perusahaan, seperti banyaknya jumlah karyawan yang digunakan dalam perusahaan untuk melakukan aktivitas operasional perusahaan, jumlah aktiva yang dimiliki perusahaan, total penjualan yang dicapai oleh perusahaan dalam suatu periode, serta jumlah saham yang beredar.

### **2.1.5 Pengertian Leverage**

*Leverage* merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa besar *aset* yang dimiliki perusahaan yang berasal dari modal atau utang (Yulinda, 2016). *Leverage* juga diartikan sebagai penggunaan dana, dimana sebagai akibat dari penggunaan dana tersebut perusahaan harus mengeluarkan biaya tetap atau beban

tetap. Perusahaan dengan *leverage* yang tinggi memiliki kewajiban lebih untuk mengungkapkan informasi secara lebih luas dibandingkan perusahaan dengan *leverage* yang rendah. Hal ini perlu dilakukan untuk menghilangkan keraguan para pemegang obligasi terhadap dipenuhinya hak-hak mereka sebagai kreditur. Semakin tinggi *leverage* sebuah perusahaan akan mendorong manajemen untuk menyajikan informasi yang lebih luas sehingga integritas laporan keuangan semakin meningkat (Fajaryani, 2015). Perusahaan dengan *leverage* yang tinggi berarti perusahaan memiliki resiko keuangan yang tinggi karena mengalami kesulitan keuangan yang disebabkan hutang yang tinggi untuk membiayai asetnya. Pengukuran *leverage* dapat digunakan dengan berbagai cara diantaranya:

- a. *Debt TO Equity Ratio* (DER) yaitu rasio yang digunakan untuk mengukur proporsi *relative* antara ekuitas dan hutang yang digunakan untuk membiayai *aset* perusahaan. Dengan cara mengambil total kewajiban hutang (*liabilities*) dan membaginya dengan ekuitas (*equity*)
- b. *Debt Ratio* atau rasio hutang yaitu rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa besar perusahaan mengandalkan hutang untuk membiayai asetnya. Dihitung dengan membagikan total hutang dengan total asetnya.
- c. *Times Interest Earned Ratio* yaitu rasio yang mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar atau menutupi beban bunga dimasa depan. Dihitung dengan membagi laba sebelum pajak dan bunga dengan biaya bunga.

## 2.2 Hasil Penelitian Sebelumnya

Wartini (2021) meneliti pengaruh mekanisme *good corporate*

*governance*, kualitas audit, dan manajemen laba terhadap integritas laporan keuangan. Populasi dari penelitian adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode 2017-2019. Total sampel penelitian 93 perusahaan. Metode penentuan sampel dengan menggunakan analisis regresi logistik. Hasil dari Penelitian menunjukkan bahwa variabel kepemilikan manajerial dan kualitas audit berpengaruh positif terhadap integritas laporan keuangan. Sedangkan kepemilikan institusional, komite audit, komisar independen dan manajemen laba tidak berpengaruh terhadap integritas laporan keuangan.

Danuta dan Wijaya. (2020) meneliti pengaruh kepemilikan manajerial, *leverage*, dan kualitas audit terhadap integritas laporan keuangan. Populasi dari penelitian adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode 2016-2018. Penelitian ini menggunakan model regresi linier berganda. Total sampel penelitian sebanyak 35 perusahaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *leverage* berpengaruh negatif terhadap integritas laporan keuangan, sementara kepemilikan manajerial dan kualitas audit tidak berpengaruh terhadap integritas laporan keuangan.

Saad dan Aisyah (2019) meneliti pengaruh ukuran perusahaan, *leverage audit tenure*, dan *finance distress* terhadap integritas laporan keuangan. Populasi dari penelitian adalah perusahaan manufaktur yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode 2014-2017. Total sampel penelitian 142 perusahaan. Metode penentuan sampel dengan menggunakan regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ukuran

perusahaan dan *financial distress* secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap integritas laporan keuangan, sedangkan *leverage* dan *audit tenure* secara parsial berpengaruh negatif dan signifikan terhadap integritas laporan keuangan.

Atiningsih dan Yohana (2018) meneliti pengaruh *good corporate governance* dan *leverage* terhadap integrasi laporan keuangan. Populasi dari penelitian adalah perusahaan manufaktur yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode 2012-2016. Total sampel penelitian 155 perusahaan. Metode penentuan sampel dengan menggunakan regresi linier berganda. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap integritas laporan keuangan, komite dan *leverage* memiliki pengaruh negatif pada integritas laporan keuangan.

Fajaryani (2015) meneliti faktor – faktor yang mempengaruhi integritas laporan keuangan. Populasi dari penelitian adalah perusahaan manufaktur yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode 2008-2013. Total sampel penelitian 54 perusahaan. Metode penentuan sampel dengan menggunakan regresi linier berganda. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa kepemilikan institusional dan ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap integritas laporan keuangan. Kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap integritas laporan keuangan. *Leverage* berpengaruh negatif terhadap integritas laporan keuangan. Spesialisasi industri auditor berpengaruh positif terhadap integritas laporan keuangan.

Risky (2016) meneliti pengaruh faktor *good corporate governance*,

ukuran perusahaan, dan spesialisasi industri auditor terhadap integritas laporan keuangan. Populasi dari penelitian adalah perusahaan manufaktur yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode 2011-2014. Total sampel penelitian 19 perusahaan. Metode penentuan sampel dengan menggunakan regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap integritas laporan keuangan, sedangkan variabel komite audit, komisaris independen, kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, dan spesialisasi industri auditor tidak berpengaruh terhadap integritas laporan keuangan pada perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia.

Dewi dan Putra (2016) meneliti pengaruh mekanisme *corporate governance* pada integritas laporan keuangan institusional dan kepemilikan manajerial terhadap integritas laporan keuangan. Populasi dari penelitian adalah perusahaan manufaktur yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode 2011-2013. Total sampel penelitian 72 perusahaan. Metode penentuan sampel dengan menggunakan regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemilikan institusional, kepemilikan manajemen dan komisaris independen berpengaruh positif pada integritas laporan keuangan, sedangkan komite audit tidak berpengaruh pada integritas laporan keuangan.

Daniel (2017) meneliti pengaruh komisaris independen, komite audit, kepemilikan institusional dan kepemilikan manajerial terhadap integritas laporan keuangan. Populasi dari penelitian adalah perusahaan manufaktur yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode 2012-2014. Total

sampel penelitian 10 perusahaan. Metode penentuan sampel dengan menggunakan regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa independen direksi independen, komite audit, kepemilikan institusional dan kepemilikan manajerial yang memiliki pengaruh signifikan terhadap integritas laporan keuangan. Artinya jika variabel independen direksi independen, komite audit, kepemilikan institusional dan kepemilikan manajerial tumbuh, itu dapat membuat perubahan pada integritas laporan keuangan. dan jika direksi independen, komite audit, kepemilikan institusional, dan kepemilikan manajerial rendah, ini dapat membuat integritas laporan keuangan juga rendah.

Monica dan Wenny (2017), meneliti pengaruh struktur *corporate governance*, ukuran KAP dan ukuran perusahaan terhadap integritas laporan keuangan. Populasi dari penelitian adalah perusahaan manufaktur yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode 2014-2015. Total sampel penelitian 66 perusahaan. Metode penentuan sampel dengan menggunakan asumsi klasik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemilikan institusional, komite audit dan komisaris independen berpengaruh positif terhadap integritas laporan keuangan. Sedangkan kepemilikan manajerial, ukuran KAP dan ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap integritas laporan keuangan.

Wardhani & Samrotun (2020) meneliti Pengaruh Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial, Ukuran Perusahaan dan *Leverage* Terhadap Integritas Laporan Keuangan. Populasi dari penelitian adalah perusahaan Pertambangan yang terdaftar di BEI tahun 2013-2018. Total

sampel penelitian ini adalah 54 perusahaan. Metode analisis data menggunakan analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap integritas laporan keuangan. sedangkan variabel kepemilikan manajerial, ukuran perusahaan dan *leverage* tidak berpengaruh terhadap integritas laporan keuangan.

Pratika (2020) meneliti Pengaruh Komisaris Independen, Komite Audit, Ukuran Perusahaan *Leverage*, dan Kantor Akuntan Publik Terhadap Integritas Laporan Keuangan. Populasi dari penelitian adalah perusahaan Property, *Real estate* dan Jasa Konstruksi Bangunan yang terdaftar di BEI periode tahun 2016-2019. Total sampel penelitian ini adalah 148 sampel. Metode analisis data menggunakan analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ukuran Kantor Akuntan Publik berpengaruh positif terhadap integritas laporan keuangan, sedangkan komisaris independen, komite audit, ukuran perusahaan dan *leverage* tidak berpengaruh terhadap integritas laporan keuangan

Muthia dan Noer (2021) meneliti Pengaruh Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional, *Leverage*, Ukuran Perusahaan, dan Kualitas Audit Terhadap Integritas Laporan Keuangan. Populasi dari penelitian adalah perusahaan *Property* dan *Real estate* yang terdaftar di BEI periode tahun 2017-2019. Total sampel penelitian ini adalah 45 perusahaan. Metode analisis data menggunakan analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap integritas laporan keuangan, sedangkan kepemilikan institusional,

*leverage*, ukuran perusahaan, dan kualitas audit tidak berpengaruh terhadap integritas laporan keuangan.

Santoso dan Andarsari (2021) meneliti Pengaruh Kepemilikan Manajerial, Ukuran Perusahaan, dan Kualitas Audit Terhadap Integritas Laporan Keuangan. Populasi dari penelitian adalah perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di BEI periode tahun 2017-2020. Total sampel penelitian ini adalah 16 perusahaan. Metode analisis data menggunakan analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial ukuran perusahaan, dan kualitas audit tidak berpengaruh terhadap integritas laporan keuangan.

Istiantoro, dkk. (2017) meneliti Pengaruh Struktur *Corporate Governance* terhadap integritas laporan keuangan. Populasi dari penelitian ini adalah perusahaan LQ45 yang terdaftar di BEI periode tahun 2009-2014. Total sampel penelitian ini adalah 18 perusahaan. Metode analisis data menggunakan analisis regresi linier berganda. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh negatif dan signifikan terhadap integritas laporan keuangan, kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap integritas laporan keuangan, komite audit berpengaruh positif terhadap integritas laporan keuangan, komisaris independen berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap integritas laporan keuangan.

Verya (2017) meneliti pengaruh ukuran perusahaan, *leverage* dan *good corporate governance* terhadap integritas laporan keuangan. Populasi dari penelitian adalah perusahaan manufaktur yang tercatat di Bursa Efek

Indonesia (BEI) pada periode 2012-2014. Total sampel penelitian 83 perusahaan. Metode penentuan sampel dengan menggunakan regresi linier berganda. Hasil dari Penelitian menunjukkan bahwa ukuran perusahaan, komisaris independen, komite audit, dan kepemilikan manajerial, dan kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap integritas laporan keuangan. *Leverage* tidak berpengaruh terhadap integritas laporan keuangan.

Penelitian ini ingin melanjutkan penelitian dari Wartini (2021), dalam penelitian terdapat persamaan dan perbedaan dengan penelitian sebelumnya. Berikut beberapa persamaan dengan penelitian sebelumnya:

1. Sama-sama meneliti tentang pengaruh *good corporate governance* terhadap integritas laporan keuangan.
2. Sama-sama menggunakan data perusahaan yang terdaftar di bursa efek Indonesia.

Sedangkan perbedaan dengan penelitian terdahulu yakni:

1. Periode pengukuran laporan keuangan perusahaan yang dijadikan sampel berbeda dengan penelitian terdahulu yang menggunakan tiga periode yaitu 2017 sampai 2019 sedangkan penelitian ini menggunakan empat periode 2018 sampai 2021.
2. Pada penelitian ini menambahkan dua variabel independennya yaitu ukuran perusahaan dan *leverage*.
3. Pada penelitian terdahulu perusahaan yang diteliti adalah perusahaan manufaktur sedangkan pada penelitian ini perusahaan yang diteliti adalah perusahaan *property* dan *real estate*.

4. Pada penelitian terdahulu menggunakan teknik analisis regresi logistik sedangkan pada penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda.

